RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KOTA MOJOKERTO TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Nuril Akhadiyah

12040254041 (S1 PPKn 2012, FISH, UNESA) nurilakhadiyah2205@gmail.com

Oksiana Jatningsih

0001106703 (PPKn, FISH, UNESA) oksianajatningsih@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, taktik, alasan dan tujuan resistensi Pedagang Kaki Lima (PKL) alun-alun Kota Mojokerto terhadap kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dari Alfred Schutz dan teori resistensi dari James Scott. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan pola resistensi PKL alun-alun kota Mojokerto bervariasi yang terbagi atas bentuk, taktik, alasan (*because motive*), dan tujuan (*in order to motive*). Bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto terbagi atas empat tindakan yaitu: (1) aksi protes; (2) negosiasi; (3) curang; (4) membandel. Taktik atau cara yang dilakukan oleh PKL terbagi atas dua hal yaitu: (1) “kucing-kucingan” dan (2) *timing* (memainkan waktu). Kedua taktik tersebut dimainkan saat PKL melawan (resisten) dengan cara membandel. Tindakan resistensi PKL ini memiliki alasan dan tujuan. Alasan PKL resisten terhadap kebijakan relokasi antara lain: (1) area relokasi yang sempit, jumlahnya yang tidak sesuai dengan jumlah PKL, dan tempatnya yang jauh dari rumah. (2) kondisi fisik yang berusia paruh baya yang lemah. Tujuan PKL melakukan resistensi adalah untuk: (1) mencukupi kebutuhan sehari-hari; (2) menabung untuk menyewa ruko; (2) eksistensi.

Kata Kunci: resistensi, pedagang kaki lima, dan relokasi.

Abstract

This study purpose to determine the resistance of Street Vendors (SV) in Mojokerto town square of the relocation policy which conducted by the government of Mojokerto. This study uses the theory of phenomenology of Alfred Schutz and resistance theory of James Scott. This study is a qualitative research design phenomenology. Data collection techniques in this study is the depth interviews and observations partisipant. The results of this study demonstrated resistance patterns of SV at Mojokerto town square, divided into shape, tactics, reason (*because motive*), and purpose (*in order to motive*). Forms of resistance carried out by SV in Mojokerto Town Square divided into four actions: (1) protest; (2) negotiations; (3) cheating; (4) misbehaving. Tactics or how that is done by SV is divided into two action: (1) “kucing-kucingan”, and (2) *timing* (play time). Being stubborn is played by SV though those two tactics. Resistance action of SV has a reason and a purpose. SV’s reasons resistant to the relocation policy, among others: (1) the relocation of a narrow area, the numbers are not in accordance with the number of SV, and a place away from home. (2) the physical condition of middle-aged weak. SV doing resistance action is for: (1) meet the daily needs; (2) saving to rent a shop; (2) existence.

Keywords: resistance, street vendors, relocation.

PENDAHULUAN

Saat ini salah satu masalah sosial yang harus dihadapi pemerintah Indonesia adalah pengangguran. Tercatat dalam BPS tahun 2015 di Jawa Timur tersedia kurang lebih 247.180 lapangan pekerjaan terdaftar sedangkan pencari lapangan pekerjaan sebesar 295.495 orang (<https://www.bps.go.id>). Ini berarti 48.315 orang yang akan tersisih. Bahkan banyak lapangan pekerjaan yang dalam perjalanannya ditutup karena perusahaan penyedia lapangan pekerjaan tersebut pailit. Perusahaan yang merugi karena berbagai sebab tersebut kemudian melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Pemutusan hubungan kerja ini menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia.

Sektor informal menjadi pilihan alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat sebagai akibat dari banyaknya pengangguran. Sektor informal dipilih karena

jumlah sektor formal tidak sebanding dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal adalah sisi lain dari akses ekonomi suatu negara dan sering dianggap sebagai parasit. Bromley (dalam Manning, 1996:185). Anggapan tersebut diberikan karena Sektor informal di negara-negara berkembang memberikan andil terhadap kriminalitas dan kekacauan.

Keterbatasan akses pada sektor formal membuat orang lebih tertarik pada sektor informal. Selain itu, alasan beberapa orang lebih memilih sektor informal karena tidak ada tuntutan untuk memiliki keahlian khusus atau ijazah yang hanya diperoleh di bangku sekolah. Sektor informal merupakan konsep yang muncul dari konsep sektor formal. Ibarat dua sisi mata uang, sektor informal tidak terlepas dari adanya sektor formal. Sektor informal merupakan implikasi dari sektor formal. Konsep

sektor formal sendiri digunakan dalam pengertian pekerja bergaji atau harian dalam pekerjaan yang permanen, seperti pekerjaan dalam dunia industri, kantor pemerintah, dan perusahaan besar yang lain. Sektor formal merujuk pada kegiatan ekonomi terorganisir, terdaftar dan dilindungi hukum. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut kemudian dimasukkan dalam istilah sektor informal (Manning, 1996:139).

Salah satu bagian dari sektor informal yang banyak dijadikan pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Kota Mojokerto memiliki Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu isi dari peraturan tersebut adalah: untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar dan di atas saluran umum sebagai tempat kegiatan usaha PKL, kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk. (Pasal 2 ayat 1).

Berdasarkan peraturan tersebut kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah relokasi. Kebijakan relokasi pertama dilakukan ke Jalan Benteng Pancasila pada tahun 2012. Relokasi diperuntukkan bagi PKL alun-alun dan PKL Jalan Joko Sambang Kota Mojokerto.

Alun-alun Kota Mojokerto telah ditetapkan sebagai tempat umum yang harus bebas dari PKL. Selaras dengan pernyataan Kasatpol PP Mashudi, "alun-alun harus steril dari PKL." Oleh karena itu, apabila ada PKL yang masih tetap berjualan di area alun-alun Kota Mojokerto pasca relokasi Satpol PP menindak PKL tersebut dengan teguran kemudian apabila masih melakukan lagi, PKL tersebut bisa ditertibkan dengan paksa.

Pedagang kaki lima yang masih berjualan di alun-alun Kota Mojokerto dikatakan resisten terhadap kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Observasi awal dilakukan pada hari Senin, 15 Februari 2016. Pada pukul 16.00 ada satu dua orang pedagang yang ada di sekitar alun-alun Kota Mojokerto. Sekitar pukul 18.20 menit atau pada waktu setelah sholat Maghrib mulai banyak pedagang yang berjualan. Tidak semua pedagang berjualan di sisi alun-alun. Ada yang berjualan di ujung jalan lingkungan Kauman. Berdasarkan penuturan seorang pedagang yang berjualan minuman *sachet*, pedagang yang berjualan di ujung gang diperbolehkan namun yang berjualan di sisi utara, timur, selatan, maupun barat alun-alun tidak diperbolehkan.

"Nggak boleh mbak berjualan di sini (sisi alun-alun). Sering kena razia kalo ada satpol PP. Katanya melanggar Perda. Tapi aku ndak tau isi

Perdanya apa, cuma dikasih tau kalau melanggar Perda. Barangku sudah banyak yang disita Satpol PP mbak. Kalo diujung gang boleh mbak, tapi kan berebut sama pedagang lain. Dan tempatnya jauh nyeberang jalan, pembeli malas kesana. Kalau disita ya diam saja memang aku nakal mau gimana lagi." (wawancara, 15 Februari 2016)

Berdasarkan petikan wawancara pedagang kopi, PKL sendiri mengetahui bahwa kegiatannya melanggar Peraturan Daerah. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penyataan dari salah satu anggota Satpol PP. Sekitar pukul 18.30 pada tanggal 20 Februari 2016 peneliti menggali informasi perihal PKL yang ada di alun-alun Kota Mojokerto dari kelompok Satpol PP yang berkumpul di sisi alun-alun Kota Mojokerto. Berikut penyataan salah satu anggota Satpol PP.

"Begini mbak, kalo masalah PKL di alun-alun sudah ada tempat yang disediakan oleh walikota. Pedagang kaki lima yang di sini melanggar Perda No. 9 Tahun 2012 tentang relokasi. Kalo penertiban di alun-alun kita (Satpol PP) mengacu kepada Perda No. 3 Tahun 2013. Ya saya masih menemukan PKL yang berjualan di sini yang seharusnya menempati tempat di area relokasi. Berdasarkan aturan walikota baik berjualan di luar maupun di dalam alun-alun tidak diperbolehkan. (wawancara, 15 Februari 2016)

PKL yang masih tetap berjualan di alun-alun Kota Mojokerto ada sekitar lebih dari 20 PKL yang menempati tiap sisi alun-alun Kota Mojokerto. Mereka melakukan transaksi perdagangan mulai dari pukul 15.30 hingga pukul 22.00. Sebagian dari mereka berdagang hingga menjelang pagi. Berdasarkan pengakuan salah satu pedagang yang berjualan minuman *sachet* mereka mengetahui bahwa yang mereka lakukan tidak diperbolehkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dan mengaku sering merelakan barang yang disita oleh Satpol PP.

Berdasarkan observasi tanggal 22 Februari 2016 pukul 18.00, di depan masjid Al-Fattah alun-alun Kota Mojokerto, sudah banyak PKL yang melakukan aktivitasnya yaitu mangkal di sisi alun-alun. Jumlah pedagang paling banyak dijumpai di depan masjid alun-alun Kota Mojokerto karena memang dekat dengan tempat parkir. Pedagang kaki lima yang hingga kini masih tetap berjualan lebih banyak yang menggunakan kendaraan bermotor. Pedagang yang resisten tersebut diantaranya 2 pedagang minuman *sachet*, 7 pedagang *pentol*, 1 pedagang jagung susu keju (jasuke), 1 pedagang pecel, 2 pedagang sosis, 2 pedagang bakso, 1 pedagang es oyen, 2 pedagang mie ayam, dan 2 penjual es krim. Semua PKL ini merupakan PKL yang berdagang makanan dan minuman yang dilakukan di atas kendaraan dan di atas gerobak.

Permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto terhadap relokasi?; (2) apa taktik yang dilakukan PKL Alun-Alun Kota Mojokerto saat melakukan resistensi sehari-hari?; (3) apa alasan dan tujuan PKL alun-alun Kota Mojokerto melakukan perlawanan tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengungkap bentuk resistensi apa saja yang telah dilakukan PKL terhadap kebijakan relokasi yang ada sejak tahun 2012; (2) mengungkap taktik atau tindakan apa saja yang dilakukan PKL dalam mengelabui penegak Perda (Satpol PP); (3) mengungkap alasan dan tujuan PKL melakukan resistensi (perlawanan) terhadap kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Fokus penelitian ini adalah tindakan resistensi yang dilakukan oleh PKL. Resistensi dalam penelitian ini adalah sikap dan tingkah laku yang dilakukan tidak berdasarkan kepada aturan yang telah ditetapkan. Resistensi dapat dikatakan tindakan melawan hukum dari warga terhadap pemerintah atau pembuat kebijakan.

Menurut Scott (dalam Alisjahbana, 2006) resistensi adalah setiap tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini. Bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat adalah suatu bentuk ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Bentuk resistensi secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum daripada melawan.

Pedagang kaki lima (*street trading*) adalah salah satu pekerjaan paling nyata dan penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah, atau Amerika latin. Namun, meskipun penting, PKL hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama lain. Bromley (Manning, 1996:228). Pedagang kaki lima dipandang sebagai pekerjaan yang tidak layak dan masuk dalam golongan pekerjaan yang dilakukan oleh strata menengah ke bawah. Bromley mengatakan dalam tulisannya bahwa PKL merupakan dampak yang timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.

Peraturan Daerah adalah produk hukum yang dibuat oleh suatu daerah sebagai sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Abdullah, 2005:131). Produk hukum yang dibuat Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan kewenangannya mengatur PKL adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang

Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Pembuatan peraturan merupakan upaya dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan, dan penertiban PKL di luar lingkungan pasar dan terminal.

Teori fenomenologi Alfred Schutz menekankan pada subjektifitas terhadap fenomena tertentu. Teori fenomenologi memiliki dasar *because motive* dan *in order to motive*. Dalam hal perlawanan PKL, *because motive* terarah pada mengapa tindakan resistensi dilakukan oleh PKL. *In order to motif* pada teori fenomenologi merujuk pada tujuan PKL melakukan resistensi. Pedagang kaki lima pasti memiliki tujuan untuk melakukan resistensi tersebut.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) sehingga disebut metode penelitian naturalistik dan disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif (Sugiyono, 2011:8). Penelitian kualitatif menekankan pada keadaan sebenarnya yang terkandung dalam suatu tindakan yang muncul dari sudut pandang alamiah pelakunya. Penelitian ini dirancang dengan penyelesaian rumusan masalah dengan dua teori, yaitu teori resistensi dan teori fenomenologi. Teori resistensi digunakan dalam menganalisis mengenai bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto dan bagaimana taktik yang dimainkan PKL dalam mempertahankan resistensinya tersebut. Teori fenomenologi digunakan untuk menganalisis alasan dan tujuan PKL dalam melakukan resistensi.

Penelitian ini dilakukan di alun-alun Kota Mojokerto yaitu di Jalan Veteran Kota Mojokerto. Alun-alun Kota Mojokerto ini menjadi pilihan lokasi penelitian karena PKL alun-alun Kota Mojokerto ini di tahun 2012 sudah ditertibkan dan direlokasi ke Jalan Benteng Pancasila. Pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto No. 3 Tahun 2013. Perda ini mengatur tentang alun-alun yang harus bebas dari PKL. Namun hingga kini masih ada PKL yang nekat berjualan di alun-alun Mojokerto. Tindakan ini merupakan bagian dari resistensi yang masuk dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni dan Juli 2016 Penelitian ini dilakukan pada saat PKL berjualan di alun-alun Kota Mojokerto.

Subjek penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Penentuan informan penelitian tidak terbatas pada jumlah orang tetapi terbatas kepada variasi data yang diperoleh. Jika data sudah jenuh maka dilakukan pemangkasan data. Informan yang sesuai dengan kriteria untuk pencapaian tujuan penelitian ini adalah informan (PKL) yang diperoleh dari hasil

observasi yang diketahui bahwa PKL ini melakukan tindakan resistensi dengan tetap berjualan di alun-alun Kota Mojokerto sampai pada saat penelitian ini dilakukan.

Informan pertama adalah pedagang pecel. yang berjualan dengan keluarganya selama 10 tahun, sejak tahun 2006. Bapak ini bernama Heru yang berasal dari Madiun. Informan yang kedua adalah Rozi pedagang kopi dan minuman *sachet*. Rozi berusia 27 tahun dan belum menikah. Informan yang ketiga adalah Yati yang berusia 52 tahun, seorang penjual rokok dan minuman dalam botol. Ia berjualan di alun-alun sejak tahun 2005. Informan yang keempat adalah Tatik yang berusia 43 tahun, seorang penjual Kopi dan minuman *sachet*. Informan yang kelima adalah Khoiruman yang berdagang *pentol*. Informan yang keenam adalah pedagang mie ayam bernama Sidik. Informan yang ketujuh adalah pedagang es oyen yang bernama Yeni. Informan yang terakhir adalah pedagang arum manis bernama Hadi. Ia berusia 47 tahun.

Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan atau perbuatan atau perilaku PKL alun-alun Kota Mojokerto yang menunjukkan penolakan atau resistensi PKL terhadap kebijakan relokasi.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti. Pengambilan data penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi yang dilakukan adalah teknik observasi partisipan. Dalam teknik observasi partisipan ini, informasi didapatkan dengan memberikan bantuan melayani pembeli, menjadi pelanggan tetap, dan membantu membersihkan peralatan berdagang.

Teknik berikutnya yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Tujuan pengambilan data dengan teknik ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai resistensi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto yang meliputi bentuk, taktik, alasan, dan tujuan PKL melakukan resistensi terhadap kebijakan relokasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumentasi dari berita *online*. Data dokumentasi diperoleh dari: www.realita.com, www.satu jurnal.com, www.bangsaonline.com

Setelah melakukan pengumpulan data kemudian dilakukan analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2012:336) menyatakan bahwa teknik analisis data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Aktivitas dalam teknik analisis data kualitatif dilakukan secara intreraktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Miles dan Huberman (1985) dalam (Sugiyono, 2012:337). Aktivitas yang digunakan untuk menganalisis data dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*drawing/verification*).

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi (*triangulate*). Triangulasi digunakan untuk mengelaborasi dan memperdalam hasil penelitian tentang resistensi PKL alun-alun Kota Mojokerto terhadap relokasi. Tujuan dari triangulasi data pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, taktik, alasan, dan tujuan tindakan resistensi PKL.

Triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu 1) triangulasi sumber; 2) triangulasi teknik; 3) triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan mewawancari PKL dari berbagai jenis makanan dan orang-orang yang membantu berdagang. Sumber-sumber tersebut satu sama lainnya akan menguatkan hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menggambarkan bentuk dan cara/taktik yang dilakukan oleh pedagang sesuai dengan jenis dagangan dan alat yang digunakan dari masing-masing PKL. Sedangkan alasan dibalik resistensi yang dilakukan pedagang sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing PKL. Tujuan dari PKL melakukan resistensi juga tidak sama antara satu dan yang lain.

Bentuk-Bentuk Resistensi

Bentuk perlawanan PKL dari masing-masing PKL berbeda. Alasan perbedaan tersebut karena keadaan psikologi atau keberanian dari PKL tersebut. Beberapa pedagang memiliki keberanian untuk melawan aturan dengan turut serta dalam aksi protes. Ada PKL yang secara aktif mengambil bagian dalam orasi untuk mengutarakan tuntutan dari PKL dan ada PKL yang turut serta dalam demonstrasi namun hanya pasif atau hanya ikut-ikutan saja. Bahkan ada juga yang hanya menunggu keputusan yang ada sebagai hasil dari aksi protes tersebut. Selain melakukan aksi protes masih ada juga bentuk resistensi yang lain yaitu negosiasi dan membandel.

Pertama, surat kabar *online* Kamis, 25 Juni 2015 mengabarkan bahwa puluhan pedagang dari alun-alun Kota Mojokerto melakukan demonstrasi. Mereka menuntut untuk dilegalkan berjualan di sekitar alun-alun. Siswanto dari pihak LSM menjadi koordinator demo. Demo ini dilakukan pada tanggal 22 Juni 2015 di depan kantor Pemerintah Kota Mojokerto atau tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 145, Balongsari, Magersari, Kota Mojokerto. Siswanto sempat diusir oleh Satpol PP karena

dianggap tidak berkepentingan. Demonstrasi ini adalah bentuk penolakan PKL terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Alasan demonstrasi ini adalah PKL menganggap bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang melarang PKL berdagang di alun-alun, berat sebelah atau sangat merugikan PKL dan hanya menguntungkan pihak pemerintah saja. Penertiban PKL oleh Satpol PP dianggap sebagai tindakan yang menyudutkan PKL Alun-Alun.

Berikut penuturan dari Tatik, seorang pedagang kopi dan minuman *sachet* mengenai aksi protes yang dilakukan PKL. Berikut hasil wawancara dengan Tatik.

“Yo wingi iku poso-poso aku melu demo. Pegel dibelani panas-panas ce’e gak digusur. Yo sing nang ngarep sing wani-wani. Tapi kabeh kepingin gak diubrak. Kabeh kepingine iku oleh dodolan nang kene.”

“Ya kemarin itu puasa-puasa saya ikut demo. Capek dibela-belain panas-panas agar tidak digusur. Ya yang ada di depan (memimpin orasi) yang berani-berani. Tapi semua ingin tidak ditertibkan. Semua ingin agar diperbolehkan berjualan di alun-alun.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Aksi protes yang dilakukan oleh paguyuban PKL alun-alun Kota Mojokerto adalah salah satu bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan relokasi yang dinilai tidak memiliki unsur sosiologis. Salah satu PKL yang ikut serta dalam aksi protes menuturkan bahwa dirinya keberatan dengan sikap Pemerintah Kota Mojokerto yang tidak bersikap adil. Berikut pemaparan dari Sidik pedagang mie ayam.

“Saya dan teman-teman kecewa kepada pak wali (Walikota Mojokerto) yang hanya membereskan alun-alun sedangkan ada banyak PKL di Kota Mojokerto yang berjualan di jalan dan trotoar. Kami menuntut keadilan dengan demo di depan kantor pak wali (Walikota Mojokerto). Melalui demo itu kami utarakan keinginan agar kami tidak diusir dari alun-alun.” (wawancara, 20 Agustus 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara diketahui bahwa alasan PKL berdemo adalah karena mereka kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang tidak adil karena hanya membereskan/membersihkan PKL di alun-alun saja. Mereka meminta keadilan kepada Pemerintah Kota Mojokerto untuk menindak PKL yang melanggar ketertiban umum di tempat lain. Jika di tempat lain tidak dihabisi, mereka meminta agar PKL alun-alun juga tidak dihabisi.

Kedua, setelah melakukan aksi protes PKL juga melakukan upaya lain untuk melawan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Pedagang kaki lima alun-alun juga melakukan upaya perundingan

dengan pihak-pihak yang terkait di dalam hal kesejahteraan rakyat, termasuk Dinas Sosial Kota Mojokerto. Berdasarkan pemaparan salah satu PKL yang juga aktif dalam setiap langkah yang ditempuh PKL dalam merespon Perda, perundingan dilakukan untuk meminta izin resmi dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto. Berikut pemaparan Heru pedagang pecel mengenai perundingan yang dilakukan PKL.

“Yah saya ikut rundingan, rundingannya yah masalah izin untuk berjualan di alun-alun. Kan alun-alunnya direnovasi. Kalau diizinkan yah berjualan di luar alun-alun. Di jalan sekitar alun-alun. Kita berunding agar larangan berjualan itu hanya berlaku untuk berjualan di dalam alun-alun. Kalau di luar toh sudah tidak merusak keindahan yang sudah ditata.” (wawancara, 13 Juni 2016)

Pemaparan tersebut diperkuat oleh penuturan dari sesama PKL lain yang juga ikut terlibat dalam negosiasi antara PKL dengan perwakilan dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan mengenai relokasi dan sterilisasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Tatik pedagang kopi.

“Tahun lalu saat puasa itu saya ikut berunding dengan pemerintah. Kami ingin boleh berjualan di alun-alun, kami tidak berjualan di dalam, kami hanya berjualan di jalan di luar alun-alun. Kami utarakan keinginan kami kepada wakil dari Walikota Mojokerto. Dengan berunding kami harap untuk diperbolehkan berjualan di luar alun-alun.” (wawancara, 23 Agustus 2016)

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa PKL melakukan negosiasi kepada Pemerintah Kota Mojokerto untuk mendapatkan izin. Para PKL menjadikan perundingan atau negosiasi untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Mojokerto. Keinginannya PKL adalah berjualan di luar area alun-alun atau jalan raya yang dirasa tidak akan mengganggu keindahan alun-alun yang telah ditata dengan taman yang rapi.

“Segala upaya telah dilakukan oleh kawan-kawan PKL untuk mendapatkan izin dari pihak Pemerintah Kota Mojokerto. Kami yang berjualan di sini mayoritas adalah warga Kota Mojokerto asli dan paling banyak dari daerah di sisi barat alun-alun yaitu lingkungan kauman. Kami juga telah berunding secara langsung dengan pak wali. Hanya saja semua tidak berbuah manis.” (wawancara, 18 Agustus 2016)

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa PKL telah berusaha dengan keras agar diizinkan untuk berjualan di sekitar alun-alun Kota Mojokerto tanpa merusak keindahan di dalam alun-alun. Namun semua upaya yang dilakukan oleh PKL tidak membuahkan hasil.

Ketiga, salah satu bentuk tindakan resistensi atau penolakan PKL alun-alun Kota Mojokerto adalah dengan melakukan tindakan penjualan lapak atau tempat

berdagang yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Seperti yang telah dipaparkan dalam BAB II bahwa PKL alun-alun Kota Mojokerto telah direlokasi ke Jalan Benteng Pancasila. Relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah usaha untuk menciptakan keadaan kota yang tertata dengan baik hingga tercipta kota kecil yang indah. Relokasi berarti memindahkan PKL dari tempat lama yang tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat berdagang ke daerah yang memang dipersiapkan untuk kegiatan berdagang yang legal atau resmi. Penempatan kembali PKL alun-alun ke Jalan Benteng Pancasila dengan cara membangun lapak untuk PKL alun-alun sesuai dengan daftar atau data jumlah PKL yang diperoleh sebelum relokasi.

Di akhir tahun 2012, relokasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Sebanyak 288 PKL dipindahkan ke Jalan Benteng Pancasila. Di sana mereka menempati bidak/lapak yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Lapak tersebut gratis untuk ditempati oleh PKL, hanya ada retribusi sebesar Rp 1000,00 untuk 1 lapak. Namun, ada PKL yang memindahtangankan lapak yang diperolehnya dengan cuma-cuma tersebut. Pemindahtanganan lapak ini berarti melanggar perjanjian atau dengan kata lain PKL mencurangi terhadap perjanjian itu. Berikut adalah petikan dari surat kabar *online* yang membicarakan tentang penemuan lapak yang dipindahtangankan.

“Mojokerto-(satujurnal.com). Sejumlah bedak dagang di area relokasi PKL alun-alun Kota Mojokerto di Jalan Benteng Pancasila (Benpas) berpindahtangan. Satpol PP Kota Mojokerto mencatat, sedikitnya 8 bedak dagang, fasilitas gratis yang diberikan Pemerintah Kota Mojokerto yang seharusnya ditempati PKL terelokasi itu ternyata sudah dipindahtangankan, dengan cara dijual dan disewakan seharga jutaan rupiah.” (satujurnal.com, diakses Januari 2016)

Berdasarkan cuplikan berita *online*, diketahui bahwa Satpol PP telah mengetahui ada 8 orang PKL yang telah memindahtangankan bedak yang diberikan cuma-cuma oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada PKL yang tergabung dalam HIPAM (Himpunan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Mojokerto) ini.

“Dari 248 PKL alun-alun yang direlokasi ke Benpas, saat ini hanya sekitar 180 PKL yang masih aktif berdagang di area relokasi. Selebihnya ada yang ‘angin-anginan’. Tapi bisa dipastikan, 8 bedak dagang pindah tangan. Tidak gratis, bedak yang dijual dihargai Rp 15 juta, sedang yang disewakan, setahun dipasang harga antara Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta.”, ungkap Imam. (satujurnal.com, diakses Januari 2016)

Berdasarkan cuplikan berita *online*, diketahui bahwa PKL menjual atau menyewakan bedak yang diperolehnya

dengan cuma-cuma tersebut kepada pihak kedua seharga jutaan rupiah. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PKL dan Pemerintah Kota Mojokerto. Pedagang kaki lima diizinkan menempati tempat tersebut. Namun, justru dipindahtangankan dengan berbagai alasan.

Cuplikan berita tersebut diperkuat dengan penuturan langsung dari salah satu PKL yang sampai saat ini masih berdagang di sekitar alun-alun Kota Mojokerto. Berikut cuplikan wawancara dengan Heru PKL yang berjualan pecel sejak tahun 2006 yang memindahtangankan lapaknya.

“Sebelum alun-alun seperti sekarang saya punya stan di dalam alun-alun mbak. Pas kemaren dipindah, saya dapat jatah tempat di Benteng. Jualan di alun-alun dulu ramai pendapatan saya sehari mencapai 150-200 ribu kalau ramai, kalau sepi 50-75 ribu. Di Benteng sepi mbak dapat sehari cuma 75 ribu itu sudah paling ramai, sedangkan kalau hujan malah tidak ada pelanggan. Tempat di Benteng akhirnya dipakai tetanggaku jualan pakaian kalau jenis itu kan masih ramai. (Itu dipakai, anda dikasih uang sewa atau gimana?). Ya, namanya tetangga ada sedikit terimakasih.” (wawancara, 8 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara, diketahui bahwa PKL pedagang pecel yaitu Heru memindahtangankan lapaknya ke orang lain dengan alasan area relokasi sepi pengunjung dan pemilik lapak pertama Heru mendapatkan uang dari PKL kedua (nb:tetangga) dengan alasan bentuk terima kasih karena sudah diberikan lapaknya yang diberi oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Penuturan tersebut juga diperkuat dengan penuturan dari Tatik pedagang kopi.

“Enak mbak nang alun-alun ramai oleh akeh tetek lumayan timbang nang benteng. Benteng sepi mbak. Ramai benteng lak sing liyane panganan nek panganan e sepi. Aku yo duwe gon saiki digoni adikku dodol klambi jeroan karo kaos cilik-cilik. Nek barang ngunu yoh payu gak rugi nek sepi gak mambu ta kadaluarsa. Iku ae ake sing gak uman gon mbak gak sesuai janjine. Onok sing oleh gon cilik ngunu gak adil.”

“Enak mbak di alun-alun ramai dapat “lumayan” banyak, daripada di Benteng. Benteng sepi mbak. Ramai Benteng kan yang selain pedagang makanan kalau makanan sepi. Aku ya punya tempat (di Benteng) sekarang ditempati adikku jual pakaian dalam dan kaos anak-anak. Kalau barang seperti itu yah laku tidak rugi kalau sepi pun tidak akan basi atau kadaluarsa. Itu saja banyak yang tidak kebagian tempat tidak sesuai janji. Ada juga yang mendapatkan tempat yang kecil/ sempit.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Berdasarkan penuturan dari Tatik, diketahui bahwa PKL merasa tempat relokasi sepi dari pembeli makanan. Jika jenis makanan yang dijual maka akan merugi jika

jenis pakaian yang dijual maka tidak begitu menjadi masalah. Diketahui pula dari penuturan Tatik bahwa pemberian lapak kepada PKL di area relokasi tidak adil karena ada PKL yang tidak kebagian tempat dan ada pula yang mendapatkan tempat yang sempit atau tidak seluas yang lainnya.

Keempat, salah satu bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL adalah dengan membandel atau tetap melakukan kegiatan perdagangan di alun-alun walaupun telah dilarang dan terikat oleh aturan (Peratuean Daerah Kota Mojokerto No. 5 Tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan PKL). Pedagang kaki lima melakukan tindakan resistensi dengan tetap menempati area alun-alun sebagai tempat berdagang. Berikut adalah penuturan dari salah satu PKL pedagang *pentol* yang berdagang menggunakan motor. Ia mengaku bahwa dirinya belum pernah ditertibkan.

“Belum pernah ditertibkan sih mbak kalau ada petugas saya langsung starter motor pura-pura keliling. Nanti kalau orangnya pergi ya berhenti. Kalau keliling terus bensinnya tekor yah kan kalau jualan seperti saya ini relatif aman dan menurut saya selama saya hati-hati saya gampang lari tidak sampai diangkut.” (wawancara, 20 Juni 2016)

Tindakan membandel juga dilakukan oleh PKL lain yang berdagang tidak menggunakan kendaraan bermotor. Namun begitu alat yang digunakan untuk berjualan masih tergolong mudah untuk dipindahkan. Berikut wawancara kepada Tatik yang merupakan PKL penjual kopi dan minuman *sachet* yang tetap berjualan walau ditertibkan.

“Yo yoopo maneh aku salah e yo terimo ae. Barangku akeh sing digowo petugas, kursi lemek lungguh, gelas. Yo iso mek mlayu mlayu. Anakku karo bojoku nang kene ngewangi bee nek onok wonge (Satpol PP) liwat.”

“Ya bagaimana lagi aku salah ya terim saja. Barangku banyak yang dibawa petugas, kursi alas duduk pelanggan, gelas. Ya hanya bisa lari-lari. Anakku sama suaminya di sini membantu barangkali kalau ada orangnya (Satpol PP) lewat.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa Tatik walaupun mengetahui tindakannya salah dan barang-barangnya disita, Tatik itu tetap nekad berdagang di alun-alun Kota Mojokerto.

Taktik Resistensi

Taktik merupakan trik atau cara khusus yang dipilih oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto untuk melakukan dan mempertahankan tindakan resistensinya. Bertahan untuk tetap berdagang di area yang terlarang adalah hal yang tidak mudah. Cara khusus yang dipilih oleh pedagang yang berdagang menggunakan kendaraan bermotor dan yang menggunakan gerobak biasa berbeda satu dan yang

lainnya. Taktik ini adalah kunci dari pertahanan yang mereka miliki dalam tindakan resistensi yang mereka lakukan. Pertahanan perlawanan yang dilakukan selama empat tahun pasca kebijakan relokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto di tahun 2012 tersebut ada di balik taktik yang digunakan oleh PKL. Taktik tersebut ada dua, yaitu “kucing-kucingan” dan *timing*

Pertama, taktik yang dipilih adalah “kucing-kucingan”. Taktik ini adalah cara PKL menghindari anggota Satpol PP yang melaksanakan tugasnya untuk menertibkan. Satpol PP yang biasa berkeliling atau berpatroli mengamankan alun-alun yang sudah ditetapkan untuk bebas dari PKL biasanya datang menggunakan mobil patroli. Pedagang kaki lima akan segera mengambil langkah untuk menghindari penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang pecel dalam masalah taktiknya untuk bertahan.

“Kalau gerobak saya mau disita saya coba pertahankan pernah sampai tarik ulur sama petugas. Terus kalau bisa lari. Kalau liat petugas dari jauh ya langsung beres-beres kabur. Sebisa mungkin menghindari.” (wawancara, 8 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut diketahui bahwa pedagang pecel menggunakan taktik untuk lari dari petugas. Penuturan tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh pedagang kopi dan minuman *sachet*. Dia bernama Rozi. Berikut adalah hasil wawancara dengan Rozi :

“Ya mungkin kabur, daripada diangkut, kan sekarang banyak yang angkut rombongan-rombong pedagang. Kalau diangkut ngambilnya kan harus ditebus juga, makanya itu.” (wawancara, 13 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rozi diketahui bahwa dirinya akan kabur saat petugas datang agar rombongan atau gerobak yang ia gunakan sebagai alat berjualan tidak sampai diangkut oleh petugas anggota satpol PP. Rozi ini juga menyatakan bahwa ia takut jika sampai gerobaknya diangkut karena untuk mengambilnya membutuhkan uang. Taktik lari dari petugas ini juga dilakukan oleh pedagang rokok. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang rokok yang bernama Yati.

“Disita sebagian daganganku ya pasrah, sebagian tak gowo mulih. Rugi akeh tapi gak sepiro soale duk gerobak. Aku dasar dagangan ndek papan kayu cilik karo terpal. isone mung iki mbak aku wes tua. Bapak e wes gak onok. Iki diwangi anak. Iki aku dolek aman ndek ngarep gang nek ono petugas kari ringkes-ringkes.”

“Disita sebagian daganganku ya pasrah, sebagian saya bawa pulang. Kerugian tidak seberapa dari pada yang lain. Saya hanya berdagang di papan

kayu dan alas seadanya. Bisanya ya hanya ini suami sudah meninggal dan saya sudah tua. Ini dibantu oleh anak. Ini saya cari aman berdagang di depan gang supaya mudah membereskannya.” (wawancara, 16 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut diketahui bahwa Yati dibantu oleh anaknya menggunakan taktik lari dari petugas. Taktik lari dari petugas ini juga digunakan oleh PKL yang lain. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang kopi dan minuman *sachet* yang bernama Tatik. Beliau berusia 43 tahun mengenai taktiknya untuk lari dari petugas.

“*Yo yoopo maneh aku salah e yo terimo ae. Barangku akeh sing digowo petugas, kursi lemek lungguh, gelas. Yo iso mek mlayu mlayu. Anakku karo bojoku nang kene ngewangi bee nek onok wonge liwat.*”

“Ya bagaimana lagi aku salah ya terima saja. Barangku banyak yang dibawa petugas, kursi, alas duduk pelanggan, dan gelas. Ya hanya bisa lari-lari. Anakku sama suamiku di sini membantu barangkali kalau ada orangnya (Satpol PP) lewat.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Cuplikan wawancara tersebut menggambarkan bahwa Tatik pedagang kopi dan minuman *sachet* juga melakukan taktik yang sama yaitu “kucing-kucingan”. Taktik ini juga dilakukan oleh pedagang es oyen. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang es oyen yang bernama Yeni.

“Ya lari yang bisa dibawa kabur dibawa yang diangkut paling yah mangkok es. Gerobak didorong sekuat-kuatnya. Kalau liat petugas dari jauh siap-siap tenaga untuk mendorong ini ke dalam gang. Nanti kalau petugas pergi dari sini kembali kesini lagi.” (wawancara, 25 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara dengan pedagang es oyen, diketahui bahwa pedagang es oyen akan segera lari saat petugas datang. Diungkapkan bahwa dirinya akan mendorong gerobak sekuat tenaga dan akan kembali ke alun-alun saat petugas telah pergi dari alun-alun.

Kedua, taktik yang digunakan oleh PKL dalam mempertahankan resistensinya adalah dengan berdagang di waktu-waktu tertentu. Waktu yang diperkirakan tidak ada petugas yang berpatroli. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang mie ayam mengenai caranya bertahan dengan resistensinya.

“Mau gimana lagi yah mbak. Ini kan dekat dengan rumah hemat waktu dan biaya. Sekarang sudah hafal jadwal kelilingnya petugas. Klo puasa gini kan saya dagang agak malam kalau sudah malam ndak mungkin ada petugas yang keliling. Pokoknya ya sebisa mungkin menghindari. Kalau ada petugas yah melawan mbak mau diangkut yah debat trus tak tinggal lari tak dorong gerobakku.” (wawancara, 21 Juni 2016)

Berdasarkan penuturan Sidik penjual mie ayam, diketahui bahwa salah satu taktik yang dimanfaatkan oleh pedagang adalah dengan memainkan waktu atau memilih waktu yang diketahui dari pengalamannya sudah tidak lagi ada petugas yang berkeliling untuk melakukan patroli. Petugas biasa selesai berkeliling pada pukul 22.00. Jadi mulai pukul 22.00, beberapa PKL mulai muncul. Mereka melakukan ini sebagai taktik agar tetap bertahan dengan resistensinya.

Motif Sebab (*Because Motive*) Resisten

Motif sebab adalah alasan yang digunakan oleh PKL untuk tetap bertahan dalam tindakan resiten yang mereka lakukan selama empat tahun ini.

Pertama, alasan yang diungkapkan PKL melakukan resistensi adalah dekat dari rumah. Berikut adalah hasil wawancara kepada pedagang pecel mengenai alasannya melakukan resistensi.

“Yah mau gimana lagi mbak lhawong ini usahaku mbak, tempat di Benteng udah pindah tangan ya mau tidak mau ya jualan di sini. Di sini lumayan ramai dan idek omah(dekat dari rumah).” (wawancara, 8 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara dengan pedagang pecel tersebut melakukan tindakan resistensi atau melawan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto karena selama ini kegiatan jual beli yang dilakukan adalah kegiatan yang menguntungkan karena dekat dengan rumah.

Berdasarkan penuturan dari pedagang kopi dan minuman *sachet*, beliau juga setuju dengan pendapat dari pedagang pecel. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang kopi dan minuman *sachet* mengenai alasannya berjualan di alun-alun pasca relokasi.

“*Yo iki tok mbak isone gak iso liyane. Nang benteng yo sepi karuan nang kene idek omah, nek ditunggok i yo melbu gang. Aku gak dodol anakku mangan opo mbak. Ngene iki aku gak ngemis untung. Anakku isok sekolah tuku beras alhamdulillah.*”

“Ya ini saja mbak bisanya tidak bisa melakukan hal yang lain. Di Benteng (area relokasi) ya sepi lebih baik di sini dekat dari rumah, kalau ditunggu (satpol pp) ya saya masuk gang. Kalau saya tidak berjualan saya dan keluarga makan apa. Sudah seperti ini dan tidak mengemis sudah beruntung. Anak saya bisa sekolah bisa beli beras Alhamdulillah.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Berdasarkan penuturan tersebut diketahui bahwa pedagang kopi dan minuman *sachet* tetap berjualan karena bidang tersebut yang mampu digelutinya. Jika bukan hal itu, menurutnya anak-anaknya tidak bisa makan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kedua, alasan yang mendasarinya untuk melakukan tindakan resisten atau melawan aturan dengan tetap berjualan di alun-alun karena keadaan fisik dirinya sendiri. Berikut penuturan penjual rokok tersebut.

“*Isone mung iki mbak aku wes tuo. Bapak e wes gak onok. Iki diwangi anak kadang. Iki aku dolek aman ndek ngarep gang nek ono petugas kari ringkes-ringkes.*” (wawancara, 16 Juni 2016)

“Bisanya hanya ini mbak saya sudah tua. Bapak (suami) sudah tidak ada(meninggal). Ini dibantu oleh anak terkadang. Ini juga saya mencari tempat yang aman diujung gang agar mudah membereskan dagangan.”

Berdasarkan petikan wawancara dengan Yati, alasan yang mendasarinya untuk melakukan tindakan resisten atau melawan aturan dengan tetap berjualan di alun-alun karena keadaan fisik dirinya sendiri. Keadaan dirinya yang telah menua dan tidak lagi memiliki pendamping hidup atau suami sebagai tulang punggung memaksa dirinya untuk tetap berjualan di alun-alun. Berjualan di alun-alun menjadi caranya untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketiga, alasan tindakan resistensinya karena merasa tindakan yang dilakukannya sudah benar karena kegiatannya lebih baik daripada meminta-minta atau mengemis kepada orang lain. Hal ini diungkapkan oleh pedagang perempuan yang berjualan kopi dan minuman *sachet*. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang kopi dan minuman *sachet*.

“*Yo iki tok mbak isone gak iso liyane. Nang benteng yo sepi karuan nang kene idek omah, nek ditungok i yo melbu gang. Aku gak dodol anakku mangan opo mbak. Ngene iki aku gak ngemis untung. Anakku isok sekolah tuku beras alhamdulillah.*” (wawancara, 18 Juni 2016)

“Ya hanya ini yang bisa dilakukan tidak bisa melakukan yang lainnya. Di Benteng (relokasi) ya sepi lebih baik di sini dekat dari rumah kalau ditunggu petugas ya masuk ke dalam gang. Saya tidak berjualan ya anak saya makan apa? Seperti ini lebih baik karena saya tidak mengemis. Anak saya bisa sekolah bisa beli beras ya alhamdulillah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tatik, diketahui bahwa konstruksi dirinya terhadap kegiatan perdagangan itu lebih baik daripada meminta-minta atau mengemis.

Keempat, alasan resistensinya berdagang di alun-alun masih aman. Berikut adalah petikan hasil wawancara kepada pedagang *pentol* yang menggunakan motor sebagai alatnya untuk berjualan.

“Yah kan kalau jualan seperti saya ini relatif aman dan menurut saya selama saya hati-hati saya gampang lari tidak sampai diangkut. Selama ini tidak ada barang yang disita soalnya saya selalu lari. Jadi aman saja berjualan asalkan tidak

melawan petugas, begitu petugas datang saya pergi berkeliling.” (wawancara, 20 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara, pedagang *pentol* merasa bahwa dirinya aman untuk melakukan kegiatan dagang di alun-alun Kota Mojokerto. Ia berdagang menggunakan motor hingga memudahkan dirinya untuk lari dari petugas.

Berdasarkan penuturan dari pedagang es oyen, sebab atau alasannya untuk berdagang di area alun-alun karena tempatnya masih relatif aman untuk dijadikan tempat berjualan. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang es oyen di alun-alun.

“Belum punya tempat lain. Kalau ini masih cukup aman yah dijalani ajah sama beberapa pedagang yang masih tersisa. Dulu lebih banyak dari ini sekarang makin sepi.” (wawancara, 25 Juni 2016)

Berdasarkan kutipan wawancara dengan pedagang es oyen, alasannya tetap berjualan walaupun sering ada penertiban pasca relokasi adalah karena belum ada tempat lain. Ia juga merasa alun-alun saat ini menjadi tempat yang relatif aman untuk berjualan. Hal senada dikatakan oleh pedagang arum manis. Berikut pemaparan pedagang arum manis mengenai alasannya melakukan tindakan resistensi.

“Ya karena di sini lumayan ramai daripada di relokasi. Di sini banyak pengunjung yang membawa anak kecil yang suka jajan manis. Kalau masalah petugas bisa kabur nanti kembali lagi. Petugasnya keliling satu kali setelah itu udah gak kesini.” (wawancara, 29 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara dengan pedagang arum manis, yang menjadi sebab pedagang arum manis tetap berdagang adalah karena merasa bahwa alun-alun adalah tempat yang ramai dan banyak pengunjung yang membawa anak kecil.

Kelima, alasan PKL melakukan tindakan resistensi juga karena tempat relokasi yang sepi untuk jenis dagangan berupa makanan. Alun-alun dirasa lebih memberikan banyak untung daripada di tempat relokasi. Berikut adalah cuplikan dari hasil wawancara dengan pedagang *pecel*.

“Sebelum alun-alun seperti sekarang saya punya *stand* di dalam alun-alun mbak. Pas kemaren dipindah, saya dapat jatah tempat di Benteng. Jualan di alun-alun dulu ramai pendapatan saya sehari mencapai 150-200 ribu kalau ramai, kalau sepi 50-75 ribu. Di Benteng sepi mbak dapet sehari cuma 75 ribu itu sudah paling ramai, sedangkan kalau hujan malah tidak ada pelanggan. Tempat di Benteng akhirnya dipakai tetanggaku. (Itu dipakai, anda dikasih uang sewa atau gimana?). Ya namanya tetangga ada sedikit terimakasih.” (wawancara, 8 Juni 2016)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh PKL yang lain. Pedagang kopi dan minuman *sachet* mengungkapkan

bahwa di tempat relokasi keadaannya sepi dan sempit. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang dengan mas pedagang kopi dan minuman *sachet*.

“Di alun-alun ini ramai mbak beda sama di tempat yang baru. Di tempat baru saya belum punya banyak pelanggan sedangkan kebutuhan sudah banyak, kalau harus cari pelanggan baru itu sulit. Pernah ada pelanggan lama yang mampir di tempat yang baru, tapi katanya tempat baru itu sempit dan kurang nyaman. Di tempat lama saya bisa gelar tikar/lesehan. Di tempat baru gak bisa mbak makanya pindah kesini lagi.” (wawancara, 13 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara dengan Yati, diketahui bahwa PKL melakukan resistensi karena area relokasi tidak seberapa luas atau bisa dikatakan sempit. Karena tempat yang sempit itu pelanggan menjadi enggan untuk berhenti dan membeli makanan atau minuman di area relokasi. Pelanggan yang sudah didapatkan di alun-alun juga tidak semua mengetahui tempat baru yang PKL alun-alun tempati. Sepinya pembeli makanan juga diungkapkan oleh Yati pedagang rokok. Menurutnya, keadaan alun-alun dulu ramai pembeli. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang rokok

“*Aku dodol biyen nang alun-alun sing gak ngene. Ndok njero cedek e air mancur. Tapi yo tau pindah. Biyen ramai ae masih dodolan cilik. Arek nom-nom tuku rokok karo ngombe cangkruk*”

“Saya dulu berjualan di alun-alun yang belum seperti ini (pra relokasi). Di dalam dekat air mancur. Tapi pernah pindah tempat. dulu tetap ramai saja walaupun berjualan seadanya. Anak muda banyak yang beli rokok dan minum sambil duduk santai.” (wawancara, 16 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara dengan Yati, diketahui bahwa pedagang rokok menganggap pendapatannya lebih besar dulu daripada sekarang. Dulu pendapatannya di alun-alun lama banyak walaupun barang dagangannya sedikit atau sederhana saja. Pedagang kaki lima lain juga mendukung bahwa alun-alun saat ini meskipun lebih sepi dari alun-alun yang lama, namun tetap lebih ramai dibandingkan dengan tempat relokasi. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang kopi dan minuman *sachet*.

“*Enak mbak nang alun-alun ramai oleh akeh tetek ‘lumayan’ timbang nang benteng. Benteng sepi mbak. Ramai benteng lak sing liyane panganan nek panganan e sepi. Aku yo duwe gon saiki digoni adikku dodol klambi jeroan karo kaos cilik-cilik. Nek barang ngunu yoh payu gak rugi nek sepi gak mambu ta kadaluarsa. Iku ae ake sing gak uman gon mbak gak sesuai janjine. Onok sing oleh gon cilik ngunu gak adil.*”

“Enak mbak di alun-alun ramai dapat “lumayan” banyak. Daripada di Benteng. Benteng sepi mbak. Ramai Benteng kan yang selain pedagang

makanan kalau makanan sepi. Aku ya punya tempat (di Benteng) sekarang ditempati adikku jual pakaian dalam dan kaos anak-anak. Kalau barang seperti itu yah laku tidak rugi kalau sepi pun tidak akan basi atau kadaluarsa. Itu saja banyak yang tidak kebagian tempat tidak sesuai janji. Ada juga yang mendapatkan tempat yang kecil/sempit.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Berdasarkan penuturan pedagang kopi dan minuman *sachet* diketahui bahwa setelah direlokasi ke Benteng pancasila, PKL tersebut memiliki tempat berdagang atau lapak yang diperoleh dari Pemerintah Kota Mojokerto. Namun, karena merasa bahwa berdagang di tempat relokasi tidak memberikan untung bagi pedagang makanan, maka ia kemudian memberikan tempat tersebut kepada adiknya.

Area relokasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh PKL membuat PKL enggan untuk menempatnya. Alun-alun dianggap oleh PKL yang resisten sebagai tempat yang memberikan peruntungan. Hal ini diungkapkan oleh pedagang *pentol*. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang *pentol*.

“Kalau sebelum relokasi itu saya jualan di dalam mbak tapi di jalan. Ya seperti ini. Kalau di tempat-tempat kan jualan *pentol* ya belum biasa. Kebiasaannya jualan di jalan. Pendapatan ya Alhamdulillah cukup digunakan menyekolahkan anak-anak. Kalau sekarang ya lumayan tapi masih ramaian dulu daripada sekarang.” (wawancara, 20 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara dengan Khoiruman pedagang *pentol*, diketahui bahwa ia di alun-alun yang lama berdagang di dalam alun-alun. Ia berdagang tidak memiliki stand tetapi di jalan. Dia tidak suka berdagang jika di dalam stand karena tidak biasa. Pedagang *pentol* memang biasa berjualan di atas kendaraan. Keadaan alun-alun yang ramai menjadi alasan PKL dalam melakukan tindakan resistensinya. Hal itu diungkapkan oleh pedagang mie ayam. Beliau menyayangkan kebijakan yang akhirnya memaksanya untuk pindah di tempat yang sepi dari pelanggan. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang mie ayam.

“Kalau dagang di alun-alun lama itu senang mbak dulu kan ramai banyak yang dagang. Ada paguyuban pedagang alun-alun. Sudah dekat satu sama yang lain. Pengunjung alun-alun juga ramai kok ndak kalah sama yang sekarang. Sekarang pengunjung foto-foto terus pulang, kalau dulu sama makan-makan sama keluarganya.” (wawancara, 21 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara dengan pedagang mie ayam, diketahui bahwa PKL melakukan resistensi karena suasana alun-alun yang ramai pengunjung. Suasana yang ramai pengunjung ini menjadi sebab (*because motive*) PKL resisten terhadap kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto untuk memindahkan PKL ke

Jalan Benteng Pancasila. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang es oyen.

“Kalau di sini sekarang ndak seramai dulu tapi ya cukup kalau di tempat baru stan makanan sepi yang ramai di jualan baju. Seperti mau lebaran ini yah ramai tempat baru itu.” (wawancara, 25 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang es oyen, diketahui bahwa berdagang di alun-alun saat ini memang lebih sepi daripada dulu, tetapi pedagang es oyen merasa bahwa walaupun sepi masih mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Pedagang es oyen merasa lebih ramai di alun-alun daripada tempat yang baru atau area relokasi. Area relokasi yang memiliki banyak pengunjung adalah pakaian, apalagi di waktu mau lebaran. Kalau lebaran musimnya orang membeli pakaian.

Akibat pelaksanaan kebijakan relokasi, alun-alun menjadi tempat terlarang bagi PKL. Mereka harus memiliki taktik untuk bertahan. Diantaranya adalah bertahan dengan berlari dari petugas. Pedagang kaki lima yang masih tetap berdagang di alun-alun mayoritas pedagang makanan yang merasa bahwa berdagang makanan di area relokasi sepi pelanggan. Selama PKL masih bisa bertahan apapun dilakukan karena alun-alun ramai pembeli. Hal ini diungkapkan oleh pedagang arum manis (*arbanat*). Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang arum manis.

“Sekarang ini lari-larian dari petugas kalau dulu diam saja di dalam alun-alun santai tidak khawatir. Pendapatan yah lumayan. Kalau sekarang menipis. Tempat barunya lebih sepi dari di sini. Saya pakai kendaraan sambil lari ndak apa-apa.” (wawancara, 29 Juni 2016)

Berdasarkan petikan wawancara dengan pedagang arum manis (*arbanat*), diketahui bahwa ia saat ini melakukan tindakan resistensi dengan lari dari petugas karena tempat yang baru atau area relokasi sepi dari pelanggan. Pedagang arum manis yang dulu berjualan di dalam alun-alun tanpa rasa khawatir untuk ditertibkan sekarang ia harus lari dari petugas menggunakan sepeda kayuhnya yang digunakan untuk berdagang.

Tujuan (*In Order to Motive*) Resistensi

Tujuan PKL melakukan resistensi berbeda satu sama lainnya. Secara umum mereka berharap agar kegiatan mereka bisa dilegalkan sehingga tidak perlu lagi kejar-kejaran dengan petugas. Tujuan tersebut kemudian terdeferensiasi dengan cara-cara resisten masing-masing termasuk dengan berunding dan tetap melakukan kegiatan jual beli di alun-alun. Beberapa diantaranya berjualan untuk mengumpulkan uang agar dapat menyewa tempat yang layak di sekitar alun-alun.

Pertama, tujuan dari PKL melakukan tindakan resistensi adalah untuk mengharapkan izin dari

pemangku kebijakan. Resistensi yang PKL lakukan adalah untuk menarik perhatian dan pengertian walikota dengan kesungguhan mereka berdagang. Pedagang kaki lima mengharapkan pengertian Walikota Mojokerto atas keterbatasan mereka. Berikut hasil wawancara dengan pedagang pecel.

“Harapannya suatu saat ada izin dari pak wali untuk tetap berjualan di sini. Ini kan daerah jalan raya bukan alun-alun. Harapannya pak wali mengerti keadaan dan keterbatasan kami. Kami tahu kalau berjualan di dalam itu merusak keindahan, tapi kalau di luar seperti ini kan ndak apa-apa. Jualan saya ya cuma ini *tok gak gawe sampah akeh*. (jualan saya ya hanya ini saja tidak membuat sampah).” (wawancara, 21 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang pecel diketahui bahwa PKL memahami tujuan relokasi agar PKL tidak merusak keindahan. Pedagang kaki lima mengharapkan akan ada izin dari Walikota Mojokerto untuk berdagang di jalan raya yang melingkupi wilayah alun-alun Kota Mojokerto. Tujuan dari resistensi itu agar walikota mengerti keterbatasan yang dimiliki oleh PKL.

Kedua, tujuan dari resistensi PKL yang lain diungkapkan oleh PKL asli Mojokerto yang berdagang kopi dan minuman *sachet*. Tujuan yang diungkapkannya berbeda dengan yang diungkapkan oleh pedagang pecel yang ingin mendapat izin dari walikota dengan terus berdagang. Pedagang kopi dan minuman *sachet* ini mengaku ingin mengumpulkan uang untuk menyewa ruko dengan masih berdagang di alun-alun saat ini. Berikut hasil wawancara dengan pedagang kopi dan minuman *sachet* yang bernama Rozi.

“Mungkin menyewa ruko atau kios-kios yang dekat sini. Ngumpulkan uang dulu mbak kan menyewa itu mahal juga. Kita liat pendapatan. Kalau pendapatan ramai, bisa untuk nabung buat nyewa kios.” (wawancara, 13 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara dengan pedagang kopi dan minuman *sachet*, diketahui bahwa ia memiliki tujuan untuk mengumpulkan uang agar bisa menyewa ruko sesuai kemampuannya. Pernyataan yang sama juga diberikan oleh pedagang mie ayam, berikut penuturan hasil wawancara dengan pedagang mie ayam.

”Kalau ada uang yah nyewa tempat dekat sini kalau ndak ada yah seperti ini ajah atau keliling kampung.” (wawancara, 21 Juni 2016)

Tujuan (*in order to motive*) yang dimiliki oleh pedagang mie ayam adalah ingin menyewa tempat yang dekat dengan alun-alun Kota Mojokerto. Namun tujuan ini hanya sebatas keinginan yang ditentukan dari kemampuannya mendapatkan uang lebih saat berdagang. Tujuan resistensi agar mendapatkan uang untuk menyewa tempat berdagang yang dekat dengan alun-alun juga diungkapkan oleh Yeni pedagang es oyen.

“Ya ngumpulin uang untuk sewa tempat atau ya semoga pemerintah memberi tempat khusus untuk pedagang makanan yang di sini dibuatkan tempat di dekat sini.” (wawancara, 25 Juni 2016)

Berdasarkan cuplikan wawancara dengan Yeni diketahui bahwa dirinya ingin menyewa tempat yang ada di dekat alun-alun. Namun pedagang es oyen ini juga ingin pemerintah Kota Mojokerto memberikan tempat yang khusus untuk PKL melakukan kegiatan dagang di dekat alun-alun Kota Mojokerto.

Ketiga, tujuan PKL resisten hanya ingin eksistensinya berjualan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini diungkapkan oleh pedagang rokok yang sudah tua dan sudah menjadi janda. Berikut cuplikan wawancara dengan Yati.

“Yo ngene iki ae mbak nek pegel dodol yo prei. Oleh e digawe ijen gak njok opo-opo.” (wawancara, 16 Juni 2016)

“Ya hanya seperti ini saja mbak kalau memang capek berdagang ya libur dulu. Penghasilan dinikmati sendiri untuk hidup sendiri.”

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut diketahui bahwa pedagang rokok hanya ingin mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan tetap berjualan. Pedagang rokok ini juga mengatakan tidak menginginkan apapun selain seperti saat ini. Tujuannya ingin mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan jika lelah ia libur berjualan. Hal senada dituturkan juga oleh pedagang kopi dan minuman *sachet*. Berikut adalah hasil wawancara dengan pedagang kopi dan minuman *sachet*.

“Yo wes pasrah aku wes gelek melok demo biyen yo aku wes dilakoni ngene iki ae timbang aku malah gak duwe penggawean. Wes pegel jalok nang pak wali. Demo pas poso tak lakoni biyen.”

“Ya sudah saya pasrah sudah sering ikut demo tahun lalu ya saya sudah lakukan. Biar saja seperti ini daripada saya tidak memiliki pekerjaan. Sudah lelah untuk berusaha mendapatkan izin dari Walikota Mojokerto. Melakukan demo pada bulan puasa pun sudah saya lakukan.” (wawancara, 18 Juni 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pedagang kopi dan minuman *sachet* sudah lelah untuk meminta kepada walikota untuk diberi izin. Ia mengungkapkan bahwa sudah pernah berdemo di saat puasa telah dilakukannya. Merasa usaha yang dilakukan sia-sia maka saat ini ia hanya ingin eksis dengan pekerjaannya agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari.

Tindakan resistensi juga dianggap sebagai penerimaan nasib yang harus dijalani oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto diungkapkan oleh pedagang arum manis. Ia merasa bahwa ini adalah keadaan yang terima tanpa lapang dada dan tidak menginginkan apapun dari tindakan resistensinya. Hadi mengungkapkan, “Yah seperti ini saja ini keadaan saya saya terima, ndak ingin

lain-lain.” Berdasarkan cuplikan tersebut diketahui bahwa Hadi tidak memiliki tujuan lain karena telah pasrah. Ia hanya ingin berjualan seperti saat ini.

Pembahasan

Dalam penelitian sebelumnya Udji Aisyah melakukan penelitian terhadap PKL membandel di Jawa Timur. Subjek penelitian tersebut adalah PKL yang ada di dua kota besar yaitu Sidoarjo dan Surabaya. Dalam penelitian tersebut ditemukan fakta bahwa cara-cara pemerintah yang menggunakan kekerasan dalam penertiban tidak menjadi faktor yang mengurangi jumlah PKL. Pedagang kaki lima justru semakin bertambah, seolah penertiban bagian dari perjuangannya.

Udji Aisyah mengungkap bahwa PKL dalam kehidupan bernegara atau hubungan PKL dengan pemerintahan memiliki hubungan yang sarat akan konflik. Jika dilihat dari sudut pandang PKL, usaha Pemerintah Kota/Kabupaten membersihkan PKL merupakan tindakan yang otoriter. Semakin hari persoalan PKL bukan semakin berkurang melainkan akan terus bertambah jumlahnya. Hasil penelitian ini sesuai atau mendukung fakta yang diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Udji Aisyah membandel. Setelah pelaksanaan relokasi, PKL masih saja ada PKL yang menolak dan melakukan perlawanan terbuka kepada Pemerintah Kota Mojokerto. Bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto antara lain: melakukan aksi protes, negosiasi, pemindahtanganan lapak (curang), dan tetap berjualan (membandel).

Pertama, bentuk resistensi PKL yang pertama adalah aksi protes. Aksi protes yang biasa disebut oleh masyarakat ‘demo’ adalah salah satu bentuk resistensi atau perlawanan yang dilakukan oleh PKL dalam menanggapi kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto. Kebijakan yang berujung pada larangan untuk berdagang di alun-alun Kota Mojokerto ini kemudian mendapat perlawanan dalam bentuk demonstrasi. Pedagang kaki lima berdemo menuntut untuk dilegalkan berdagang di sekitar alun-alun. Demo ini dilakukan oleh PKL dengan bantuan koordinator yang bukan dari PKL. Demo dilakukan oleh PKL beberapa kali. Demonstrasi dipilih oleh PKL dengan alasan mampu menunjukkan aspirasi yang PKL bawa kepada pemerintah Kota Mojokerto. Dalam aksi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto didukung oleh ketua DPRD Kota Mojokerto.

Berdasarkan teori fenomenologi, tindakan protes yang dilakukan oleh PKL memiliki alasan dan tujuan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui alasan demonstrasi ini adalah PKL menganggap bahwa Peraturan Daerah Kota Mojokerto yang melarang PKL berdagang di alun-

alun tidak memihak kalangan PKL atau masyarakat rendah. Penertiban PKL oleh Satpol PP dianggap sebagai tindakan yang menyudutkan PKL alun-alun. Menurut mereka (PKL) penertiban seharusnya juga dilakukan di seluruh wilayah Kota Mojokerto dan tidak hanya di alun-alun.

Tujuan PKL dalam demonstrasi ini PKL Kota Mojokerto menginginkan penertiban merata di seluruh wilayah kota. Dengan cara berdemonstrasi PKL berharap untuk mendapatkan haknya dengan diberi izin berdagang, dan menginginkan keadilan yaitu menginginkan agar Pemerintah Kota Mojokerto juga menindak PKL di tempat lain dengan perlakuan yang sama karena pelanggaran atau tindakan yang melawan/resisten terhadap kebijakan tidak hanya dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto.

Kedua, bentuk resistensi yang dilakukan PKL adalah perundingan (negosiasi). Bentuk resistensi ini adalah tindak lanjut dari demonstrasi yang dilakukan oleh PKL. Demonstrasi yang telah dilakukan adalah tuntutan langsung PKL kepada Pemerintah Kota Mojokerto. Pemerintah Kota Mojokerto tidak dapat mengetahui secara langsung yang diharapkan oleh peserta demonstrasi. Oleh karena itu, cara yang digunakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk mengetahuinya adalah dengan menemui secara langsung perwakilan dari PKL yang melakukan aksi protes.

Pemanggilan wakil PKL ke hadapan Pemerintah Kota Mojokerto membuat PKL memilih wakilnya yang tepat agar aspirasinya diketahui oleh Walikota Mojokerto dengan baik. Dalam perundingan ini, PKL mengirimkan wakil yang cakap untuk membujuk dan bersemangat untuk membela dirinya dan teman sesama PKL untuk mendapatkan izin berdagang seperti sediakala.

Ketiga, bentuk resistensi yang dilakukan PKL adalah pemindahtanganan lapak. Pasca relokasi 2012, PKL alun-alun secara keseluruhan tidak tersisa dipindahkan ke Jalan Benteng Pancasila. Disana, PKL diberikan fasilitas lapak secara gratis atau tanpa dipungut biaya. Namun dalam hal operasionalnya kemudian ada biaya retribusi untuk menjaga kebersihan lapak PKL. Lapak itu hanya boleh digunakan oleh dirinya sendiri. Apabila tidak ditempati lagi oleh PKL *eks* alun-alun Kota Mojokerto maka harus dikembalikan lagi kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang memiliki hak milik.

PKL *eks* alun-alun Kota Mojokerto ternyata memindahtangankan lapaknya kepada orang lain dengan cara menjual atau menyewakan lapaknya. Satpol PP Kota Mojokerto telah mengetahui ada 8 orang PKL yang telah memindahtangankan bedak/lapak yang diberikan cuma-cuma oleh Pemerintah Kota Mojokerto kepada PKL yang tergabung dalam HIPAM (Himpunan Pedagang Kaki Lima Alun-alun Kota Mojokerto) ini. Lapak tersebut

dijual atau disewakan seharga jutaan rupiah. Hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara PKL dan Pemerintah Kota Mojokerto.

PKL memberikan alasan pemindahtanganan lapak karena ia merasa bahwa berdagang makanan dan minuman di area relokasi sepi pengunjung, sedangkan yang ramai atau banyak pelanggan yang datang adalah pedagang pakaian. Pedagang kaki lima pemilik lapak pertama mendapatkan uang dari PKL kedua dengan alasan uang terima kasih karena sudah diberikan lapak milik Pemerintah Kota Mojokerto tersebut.

Keempat, bentuk resistensi PKL adalah membandel. Bentuk ini merupakan cara PKL melakukan resistensi dengan tetap berjualan. Pedagang kaki lima yang menggunakan motor akan segera *menstarter* kendaraannya agar tidak sampai ditertibkan. Ia juga dengan mudah kembali ke alun-alun Kota Mojokerto saat petugas telah pergi. Pedagang kaki lima yang hanya menggunakan gerobak atau alat sederhana seperti gerobak untuk berdagang lebih sulit berlari dari petugas namun pemilihan alat tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan mengamankan diri.

Bentuk resistensi yang dilakukan PKL dengan cara membandel ini kemudian muncul taktik yang digunakan oleh PKL untuk tetap eksis dengan tindakan resistensinya. Taktik yang dipilih oleh PKL ada tiga yaitu: “kucing-kucingan”, memilih waktu, dan memilih alat berjualan yang tepat.

“Kucing-kucingan” adalah salah satu upaya PKL untuk dapat tetap bertahan dengan resistensinya, tetap berdagang di daerah alun-alun Kota Mojokerto. Satpol PP bertugas menegakkan Perda dengan menindak PKL yang melakukan pelanggaran. Jika melihat petugas patroli dari jauh PKL akan segera mengambil langkah untuk menghindari penertiban yang dilakukan oleh mereka. Dalam taktik bertahan pedagang yang hanya menggunakan gerobak sebagai alat dagangannya seperti pedagang pecel, pedagang es oyen, dan pedagang mie ayam akan mengemasi barangnya dan mendorong sekuat tenaga gerobak milik mereka.

Taktik lain yang digunakan oleh PKL dalam mempertahankan resistensinya adalah dengan berdagang di waktu-waktu tertentu. Waktu yang diperkirakan tidak ada petugas yang berpatroli. Waktu yang dimaksud biasanya adalah waktu malam larut atau sekitar pukul 21.00, keatas. Waktu malam memang dimungkinkan tidak akan ada petugas yang berpatroli. Pedagang kopi juga biasanya masih memiliki banyak pelanggan di jam 9 malam ke atas saat petugas telah pergi.

Teori fenomenologi Alfred Schutz memiliki dua substansi yang terkandung dalam fenomena sosial. Fenomena resistensi yang dilakukan oleh PKL alun-alun Kota Mojokerto juga mengandung substansi yang ada

dalam teori fenomenologi Alfred Schütz. Dua substansi tersebut adalah *because motive* dan *in order to motive*. Motif sebab adalah alasan yang digunakan oleh PKL untuk tetap bertahan dalam tindakan resisten yang mereka lakukan selama empat tahun ini. Berdasarkan hasil penelitian *because motive* atau alasan yang disampaikan PKL sebagai dasar perlawanannya ada tiga yaitu: alasan tempat, alasan fisik, dan alasan sosial. Alasan tempat terbagi menjadi tiga bentuk yaitu: Alun-alun dekat dari rumah, area relokasi yang sempit dan tidak sesuai harapan, alun-alun adalah tempat menguntungkan. Alasan fisik diungkapkan oleh PKL yang berusia lanjut. Alasan sosial yaitu karena berdagang merupakan pekerjaan yang halal. Mayoritas pedagang di alun-alun Kota Mojokerto adalah pedagang dari daerah lingkungan Kauman. Lingkungan ini adalah lingkungan yang berbatasan langsung dengan alun-alun.

Hal yang sering dijadikan alasan oleh pedagang adalah dekat dari rumah karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mempersiapkan lapak dagangan mereka. Mereka juga dapat bergantian dengan anggota keluarga mereka untuk berdagang saat sudah lelah atau pedagang tersebut mandi dan beribadah. Sebelum alun-alun direnovasi seindah saat ini, PKL tersebut sudah membangun kehidupan dengan berdagang di dalam alun-alun. Pedagang kaki lima merasa berdagang di alun-alun adalah pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan waktu dan biaya. Mereka menganggap tindakan resistensinya bukan hal buruk melainkan usaha untuk mempertahankan kehidupannya. Pedagang kaki lima yang resisten terhadap kebijakan relokasi menganggap bahwa kegiatannya saat ini akan lebih menguntungkan.

Alasan lain yang dijadikan PKL resisten adalah area relokasi yang sempit. Luas bedak di area relokasi tidak sesuai dengan perjanjian awal. Jumlah bedak yang lebih sedikit dari jumlah PKL yang harus direlokasi membuat PKL harus berbagi bedak dengan PKL lain. Pedagang yang dianggap tidak membutuhkan bedak yang luas kemudian bedaknya terbagi menjadi dua untuknya dan untuk PKL lain. Mereka juga mengungkapkan alasannya resisten adalah karena tempat relokasi yang sempit untuk jenis dagangan berupa makanan. Alun-alun dirasa lebih memberikan banyak untung daripada di tempat relokasi

Alasan resistensi berikutnya yang diungkapkan PKL karena alun-alun adalah tempat yang dianggap memberikan keuntungan lebih. Pendapatan yang lebih besar membuat PKL rela untuk mengambil resiko untuk ditertibkan dibandingkan harus berjualan di area relokasi yang sempit dan sempit pelanggan.

Salah satu alasan atau sebab yang diungkapkan PKL dalam melakukan tindakan resisten juga karena keadaan fisik dirinya sendiri. Keadaan diri yang telah menua atau telah lanjut dan tidak lagi memiliki pendamping hidup

atau suami sebagai tulang punggung memaksanya untuk tetap berdagang di alun-alun.

Alasan yang lain yaitu sebagian dari PKL beranggapan bahwa tindakan yang dilakukannya sudah benar karena kegiatannya lebih baik daripada memintaminta atau mengemis kepada orang lain. Ada konstruksi dalam diri PKL yang menganggap bahwa kegiatan perdagangan itu lebih baik daripada memintaminta atau mengemis. Untuk saat ini menurut PKL kegiatan berdagang di alun-alun masih aman. Pedagang kaki lima beberapa diantaranya menggunakan kendaraan bermotor untuk berdagang. Mereka melakukan tindakan berdagang dengan kendaraan bermotor yang memudahkan mereka untuk lari dari petugas.

Setelah relokasi dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto, kemudian muncul resistensi yang dilakukan PKL dengan berbagai bentuk disertai taktik khusus untuk bertahan dalam resistensinya. Setelah adanya resistensi dengan berbagai bentuk tersebut, dalam regulasi atau pengaturan yang dilakukan Pemerintah Kota Mojokerto tidak mengalami perubahan. Satpol PP tetap melakukan penertiban sesuai tugasnya. Intensitas penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP tidak bertambah. Satpol PP tetap melakukan tugasnya berpatroli di seluruh wilayah Kota Mojokerto.

Pola tindakan PKL dalam melakukan resistensi tetap sama yaitu dalam bentuk membandel. Namun aksi protes atau demo tidak lagi dilakukan oleh mereka. Jumlah PKL yang membandel juga tetap tidak bertambah. Pedagang kaki lima yang membandel menempati bahu jalan di sisi utara, timur, selatan, dan barat alun-alun. Alun-alun bagian dalam kini ditempati berdagang 'pedagang asongan'. Mereka tetap diperbolehkan berjualan karena cara berjualan mereka dengan berjalan atau tidak menempati tempat tertentu. Di area alun-alun kini banyak dijumpai orang yang menyewakan sepatu roda, skuter, dan mobil anak. Kini alun-alun bersih dari PKL di dalamnya namun masih dijumpai PKL di jalan sekitar.

Tindakan resistensi PKL terhadap relokasi akan tetap menjadi pilihan ketika PKL merasa area relokasi tidak lebih produktif dibandingkan tempat semula.

PENUTUP

Simpulan

Hasil penelitian ini terdiri dari empat hal, yaitu: (1) bentuk-bentuk resistensi; (2) taktik PKL; (3) sebab PKL melakukan resistensi; (4) tujuan PKL melakukan resistensi. Bentuk-bentuk resistensi ada lima yaitu : (1) aksi protes menuntut izin dan penghapusan peraturan; (2) Melakukan negosiasi dengan pemangku kebijakan untuk menampung keinginan PKL; (3) menjual atau menyewakan tempat berdagang yang tidak mereka inginkan; (4) membandel dengan tetap menempati daerah

terlarang untuk berjualan. Taktik yang merupakan cara PKL bertahan dalam tindakan resistensinya ada dua macam: (1) “kucing-kucingan” dengan petugas lapangan atau Satpol PP dan (2) *timing* (pemilihan waktu tertentu yang diketahui tidak ada Satpol PP yang berpatroli).

PKL alun-alun Kota Mojokerto melakukan tindakan resistensi karena empat hal yaitu: (1) alasan tempat yang meliputi, tempat yang mudah dijangkau (dekat dari rumah), tempat yang ramai dan mudah untuk bersembunyi (“kucing-kucingan”), dan area relokasi yang tidak sesuai harapan; (2) alasan fisik lemah yang meliputi, usia lanjut dan wanita; (3) karena merasa kegiatannya adalah hal benar karena tidak mengemis; (4) Karena butuh tempat yang ramai untuk persiapan menyewa lapak.

Tujuan yang ingin dicapai oleh PKL dengan melakukan resistensi atau perlawanan terhadap kebijakan relokasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah: (1) ingin keadilan; (2) pemenuhan kebutuhan hidup. Tindakan resistensi PKL terhadap relokasi akan tetap menjadi pilihan ketika PKL merasa area relokasi tidak lebih produktif dibandingkan tempat semula.

Saran

Saran yang diberikan sesuai hasil penelitian ini yaitu: Pemerintah Kota Mojokerto sebaiknya melakukan perundingan rutin dengan PKL selama proses pembuatan lapak baru bagi PKL berlangsung. Pemerintah Kota Mojokerto juga sebaiknya memberikan perhatian kepada seluruh PKL yang melanggar aturan di wilayah Kota Mojokerto dan tidak terfokus pada satu titik seperti alun-alun Kota Mojokerto. Hal yang paling penting, Pemerintah Kota Mojokerto perlu mempertimbangkan lagi komponen yang baik untuk keberhasilan relokasi seperti ketersediaan lapak di area relokasi yang harus sesuai dengan jumlah PKL yang hendak direlokasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Attamimi, Lucky. 2014. Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya (*Studi Deskriptif Resistensi Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya*). Surabaya: Universitas Airlangga.

Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITS Press.

Asiyah, Udji. 2012. Volume 25. No. 1. *Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur*. *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik*. Departemen Sosiologi: FISIP, Universitas Airlangga. Diunduh pada 12 Desember 2015.

Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Handoyo, Eko. 2002. *Kontribusi Modal Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pascarelokasi*. *Jurnal Komunitas Research & Learning In Sociology and Anthropology*.

<http://realita.co/index.php?news=Wali-Kota-Mojokerto-Dituding-Arogan-terhadap-PKL>, (diakses bulan Agustus 2015).

<http://www.bangsaonline.com/berita/12187/dewan-kota-mojokerto-minta-pemkot-toleransi-pkl-alun-alun-sampai-lebaran-tuding-pol-pp-tebang-pilih>, (diakses bulan Agustus 2015).

<http://www.satu jurnal.com/2014/12/8-pkl-benpas-terendus-jual-sewa-bedak.html>, (diakses bulan Agustus 2015).

Manning, Chris dan Effendi, Tadjuddin Noer. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Saputra, I Made Dian. 2015. *Resistensi Pedagang Acung di Kawasan Kerta Gosa Klungkung terhadap Perda No. 2 Tahun 1993*. Bali: Universitas Udayana.

Scott, James C. 1993. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES.

Scott, James C. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Septiana, Dwi. 2011. *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang (Studi Kasus PKL di Jalan Kokroso dan Jalan Kartini Timur)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

Setiawan, Moga. 2014. *Etos Kerja Pedagang Kaki Lima Pasca Penertiban di Perumahan Taman Pinang Kabupaten Sidoarjo*. Skripsi tidak diterbitkan. Surabaya: Program Sarjana Unesa.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Triwulan, Cicik. 2008. Implementasi Perda No. 5 Tahun 2005 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi di Kota Mojokerto). Diunduh pada 12 Desember 2015.